

ABSTRAK

Ayu Amelia, 1203030137, 2024: Fasilitasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019 Di Kabupaten Bogor Perspektif Siyasah Dusturiyah

Hak asasi bagi penyandang disabilitas masih kerap diabaikan dan belum terpenuhi secara merata hal ini dikarenakan penyandang disabilitas masih dipandang sebelah mata oleh sebagian besar masyarakat, dengan keterbatasan yang dimiliki membuat mereka dianggap sebagai kelompok yang lemah. Berkaitan dengan hak politik penyandang disabilitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Di Kabupaten Bogor, tingkat partisipasi penyandang disabilitas masih sangat rendah, dengan rata-rata di bawah 44 persen. Pada pemilihan umum, penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya hanya mencapai 39,2 persen atau sebesar 787 dari total pemilih 2.006.

Tujuan Penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pelaksanaan hak pilih pemilih disabilitas di Kabupaten Bogor 2) Untuk mengetahui kendala pemenuhan hak pilih pemilih disabilitas di Kabupaten Bogor 3) Untuk mengetahui tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pemenuhan hak pilih pemilih di Kabupaten Bogor.

Teori Demokrasi berfokus pada prinsip bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Sedangkan Teori Hak Politik, pada hak-hak yang dimiliki oleh warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk hak pilih. Dan Siyasah dusturiyah berbicara tentang hubungan antara rakyat dan pemimpinnya dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi dalam siyasah dusturiyah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian metode kualitatif deskriptif analisis. Sumber data berasal dari Data Primer (wawancara), Data Sekunder (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas). Teknik pengumpulan data diambil secara observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menggambarkan sebagai berikut: 1) KPU Kabupaten Bogor sebagai penyelenggara pemilu sudah mengupayakan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas akan tetapi upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Bogor belum terlaksana secara maksimal 2) Terdapat kendala-kendala dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di Kabupaten Bogor seperti Kurangnya Respon Penyandang Disabilitas dalam Sosialisasi Pemilu, kurangnya Pengetahuan Penyandang Disabilitas tentang Pentingnya Fasilitas Pemilu, dan Kurangnya antusias dari penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam pemilu 3) Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam perspektif siyasah dusturiyah di Kabupaten Bogor telah sesuai dengan siyasah dusturiyah. Hal itu karena pemilihan umum 2019 di Kabupaten Bogor menjunjung tinggi dan menghormati kesetaraan (*al-musawah*), keadilan (*al-'adalah*), dan kebebasan (*al-huriyyah*).

Kata kunci: *Hak Politik, Penyandang Disabilitas, Pemilihan Umum, Siyasah Dusturiyah*